

ABSTRAK

“Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Provinsi DKI Jakarta”

Melihat permasalahan yang ada di DKI Jakarta tentang pendidikan dan kemiskinan, selain itu mengacu pada Undang Undang No. 12 tahun 2012 Tentang pendidikan tinggi dalam Bab III pasal 76 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan di ayat ke-2 bahwa salah satu bentuk pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dapat berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, dan bantuan atau membebaskan biaya pendidikan. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa berprestasi. Maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu.

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Provinsi DKI Jakarta melalui dimensi yang dikemukakan oleh Goerge C. Edward III. Dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpul melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori dari Miles and Huberman dalam Sugiyono (2013) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarik kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dan cukup optimal walaupun masih ada beberapa hal yang masih bisa dibilang belum efektif. Bisa dilihat dari kurangnya sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan implementasi kebijakan, sikap yang dimiliki pelaksana kebijakan yang kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu memperbanyak jumlah sumberdaya dalam implementasi kebijakan agar dapat menjalankan kebijakan secara optimal dan maksimal, serta meningkatkan kembali sikap tegas/ketegasan dalam menjalankan kebijakan sehingga permasalahan dan hambatan dapat ditangani dan dipecahkan secara cepat, dan membuat kebijakan tersebut menjadi lebih efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan biaya, Pendidikan

